



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PPMHKP BALIKPAPAN 2026

KATA PENGANTAR



Manual Indikator Kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolakukur wujud pertanggungjawaban Balai PPMHKP Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh data akurat tentang capaian keberhasilan kinerja dalam rangka pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Balai KIPM Balikpapan dimasa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Balikpapan, 05 Januari 2026

Kepala Balai PPMHKP Balikpapan



Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

- A. Kata Pengantar
- B. Daftar Isi
- C. Manual IKU BKIPM Balikpapan :
 - IK. 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
 - IK. 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
 - IK. 3 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
 - IK. 4 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)
 - IK. 5 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)
 - IK. 6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)
 - IK. 7 Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Persen)
 - IK. 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)
 - IK. 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)
 - IK. 10 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
 - IK. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan

Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai PPMHKP Balikpapan	IK. 1
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan
Indikator Kinerja Utama	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
Deskripsi IKU	Definisi : • Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten • Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan • Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada : 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku • Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual Formula : $\% X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \times 100 \%$ X : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan A : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB C : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB E : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB Kapal F : Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIB xn : Jumlah dari unsur pembentuk (6)^{*)}

	*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT				
Satuan Pengukuran	% (Persentase)				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Pusat Mutu Produksi Primer				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Triwulanan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	70	84.37	70	125	72

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 2
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan
Indikator Kinerja Utama	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
Deskripsi IKU	Definisi : • Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat. • Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. • Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada : 1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius); 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. • Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah Formula : $\% X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ % X : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan A : Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk yang menerapkan manajemen keamanan diatas standar

	B : Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar C : Persentase SPDI yang diterbitkan di Pelaku Usaha Perikanan xn : Jumlah dari unsur pembentuk (2)^{*)} *) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada di UPT				
Satuan Pengukuran	% (Persentase)				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Pusat Mutu Pasca Panen				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Triwulanan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	70	142	70	150	72

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 3
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Indikator Kinerja Utama	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
Deskripsi IKU	Definisi : - Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional. - ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: - Ruang Lingkup - Acuan Normatif - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumber Daya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen - ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan - Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumberdaya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen Formula : $X = \frac{A+B}{zn} \times 100\%$

	% X : Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan A : Presentase Nilai Penerapan ISO 17020 B : Presentase Penerapan ISO 17025 zn : Jumlah unsur pembentuk				
Satuan Pengukuran	% (Persentase)				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Pusat Manajemen Mutu				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Triwulanan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	71

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 4
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Indeks)
Deskripsi IKU	Definisi : Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Formula : Keterangan : IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke i IP₁ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} * R_{1j} : Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} : Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} : Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} : Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m
Satuan Pengukuran	Nilai
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan
Sumber Data	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Semester				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	86	93.12	82	86.39	82.5

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 5				
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja Utama	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan				
Deskripsi IKU	Definisi : Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.				
	Formula : Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona integritas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) - Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.				
Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Inspektorat Jenderal				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Tahunan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	77

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 6				
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja Utama	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)				
Deskripsi IKU	Definisi : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.				
	Formula : Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I <i>*) Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP</i>				
Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Inspektorat Jendral dan BBPMHKP				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Tahunan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	82	82	86	87.5	86.2

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 7				
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja Utama	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)				
Deskripsi IKU	Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran				
	Formula : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan mengikuti data status tindak lanjut pada Aplikasi SIDAK <i>*) Apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BPPMHKP</i>				
Satuan Pengukuran	Persen (%)				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id)				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Dipersempit (Rata-rata)				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Triwulan				
Tabel Data	2024		2025		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	80	100	85	100	86

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 8																											
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																											
Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)																											
Deskripsi IKU	Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																											
	Formula : $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.																											
	<table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																									
1	Revisi DIPA	10																										
2	Deviasi RPD	15																										
3	Penyerapan Anggaran	20																										
4	Belanja Kontraktual	10																										
5	Penyelesaian Tagihan	10																										
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																										
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																										
8	Capaian Output	25																										
Satuan Pengukuran	Nilai																											
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah																											
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan																											
Sumber Data	Kementerian Keuangan																											
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir																											
Metode Cascading	Direct																											

Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Semester				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	93.76	96.97	92	90.85	92.1

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 9										
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
Indikator Kinerja Utama	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)										
Deskripsi IKU	Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.										
	Formula : $NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$										
	Keterangan : NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektifitas Satker NE Satker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektifitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker										
	NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut :										
	<table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektifitas (75 %)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efisiensi Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25 %)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektifitas (75 %)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efisiensi Satker	45	Efisiensi (25 %)	1. Nilai Efisiensi Satker
Variabel	Uraian	Bobot (%)									
Efektifitas (75 %)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30									
	2. Nilai Efisiensi Satker	45									
Efisiensi (25 %)	1. Nilai Efisiensi Satker	25									

Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah				
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan				
Sumber Data	Kementerian Keuangan				
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	Direct				
Polarisasi	Maximize				
Periode Pelaporan	Tahunan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	71	94.56	71.5	75	92.1

Nama Unit Pemilik IKU : BPPMHKP Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 10
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)
Deskripsi IKU	Definisi : Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.. Formula : Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP : $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang / Jasa}} \times 100 \%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan
Sumber Data	Biro Umum dan PBJ
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	Direct
Polarisasi	Maximize
Periode Pelaporan	Triwulan

Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	76	100	77

Nama Unit Pemilik IKU : BKIPM Balikpapan
 Nama Unit Atasan Pemilik IKU : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Manual IKU Level III Balai KIPM Balikpapan	IK. 11
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama	Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
Deskripsi IKU	Definisi : • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.. • Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. • Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP Formula : Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ x Nilai penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : SKM unit pelayanan x 25
Satuan Pengukuran	Nilai
Tingkat Validitas IKU	Output Kendali Rendah
Unit / Penanggung Jawab IKU	Balai PPMHKP Balikpapan
Sumber Data	BPPMHKP
Jenis Perhitungan Data	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	Direct
Polarisasi	Maximize

Periode Pelaporan	Triwulan				
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	3.36	4	3.36	3.82	3.5